



# Afiliasi Politik PMII dan IMM pada Pemilu 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Andi Fitri Sasmita<sup>1</sup>, Bahjatul Murtasidin<sup>2</sup>, Novendra Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bangka Belitung

Email : [andifitrisasmita@gmail.com](mailto:andifitrisasmita@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received October 02, 2025

Revised October 23, 2025

Accepted October 28, 2025

### Keywords:

Political Affiliation, PMII, IMM, Resource Mobilization, 2024 Election.

## ABSTRACT

Bangka Belitung Islands Province is one of the regions in Indonesia that has interesting local political dynamics, especially in the context of the 2024 General Election. The involvement of student organizations cannot be separated from the increasing political awareness of the young generation in Bangka Belitung, who are trying to raise local issues such as illegal tin mining, environmental damage, and regional development inequality. This is a strategic opportunity for student organizations to form a political movement that is critical and oriented towards structural change through the political affiliates of PMII and IMM in Bangka Belitung. This research aims to find out how political affiliation occurs as well as political challenges and opportunities towards PMII and IMM. Using qualitative research methods, based on five indicators in the theory of resource mobilization by Oberschall (1973) namely organizational structure, leadership, resources, network-participation, as well as opportunities and individual capacity. It was found that both organizations have strong mobilization potential, especially in terms of network and cadre quality. However, the limited material resources and the absence of a structured institutional strategy cause political mobilization to be more personal. Leadership also plays a big role in determining the direction of the affiliation, which sometimes causes differences in internal views. Even so, the 2024 election became an important opportunity for cadres to contribute to politics, with the need for institutional strengthening and consistency of movement values so as not to be trapped in practical politics alone.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Article Info

### Article history:

Received October 02, 2025

Revised October 23, 2025

Accepted October 28, 2025

### Kata Kunci:

Afiliasi Politik, PMII, IMM, Mobilisasi Sumber Daya, Pemilu 2024

## ABSTRAK

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki dinamika politik lokal yang menarik, terutama dalam konteks Pemilu 2024. Keterlibatan organisasi mahasiswa tidak lepas dari meningkatnya kesadaran politik generasi muda di Bangka Belitung, yang berusaha mengangkat isu-isu lokal seperti pertambangan timah ilegal, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan daerah. Hal ini menjadi peluang strategis bagi organisasi mahasiswa untuk membentuk gerakan politik yang kritis dan berorientasi pada perubahan struktural melalui afiliasi politik PMII dan IMM di Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana afiliasi politik yang terjadi serta tantangan dan peluang politik terhadap PMII dan IMM. Menggunakan metode penelitian kualitatif, berdasarkan lima indikator di dalam teori mobilisasi sumber daya oleh Oberschall (1973) yakni struktur organisasi, kepemimpinan, sumber daya, jaringan-partisipasi, serta



peluang dan kapasitas individu. ditemukan bahwa kedua organisasi memiliki potensi mobilisasi yang kuat, terutama dari sisi jaringan dan kualitas kader. Namun, keterbatasan sumber daya material dan tidak adanya strategi kelembagaan yang terstruktur menyebabkan mobilisasi politik lebih bersifat personal. Kepemimpinan juga berperan besar dalam menentukan arah afiliasi, yang kadang menimbulkan perbedaan pandangan internal. Meskipun begitu, Pemilu 2024 menjadi peluang penting bagi kader untuk berkontribusi dalam politik, dengan catatan perlunya penguatan kelembagaan dan konsistensi nilai-nilai gerakan agar tidak terjebak dalam politik praktis semata.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

**Corresponding Author:**

Andi Fitri Sasmita

Universitas Bangka Belitung

E-mail: [andifitrisasmita@gmail.com](mailto:andifitrisasmita@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Peran dan keberadaan mahasiswa dalam konteks kehidupan demokrasi bangsa telah terbukti menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia (Slametmuljana, 1969). Mahasiswa tidak hanya sebagai aktivis pergerakan, tetapi mengambil peran dalam situasi politik dan persoalan-persoalan struktural melalui gerakan mahasiswa. Muridan S. Widjojo (1999) merumuskan gerakan mahasiswa terdapat dalam dua bentuk gerakan, yakni gerakan moral dan gerakan politik. Gerakan politik menempatkan diri pada pandangan bahwa perubahan politik dapat dilakukan dengan cara mengingatkan para elit politik atau bahkan mengandung kepentingan politik untuk meruntuhkan rezim politik yang berkuasa. Berbeda dengan gerakan moral, gerakan politik lebih menekankan suatu gagasan seperti mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan permasalahan sosial dan berbagai kejahatan moral terhadap masyarakat dengan kata lain, kapasitas gerakan moral yang sebatas dengan mengingatkan atau menghimbau penguasa untuk melakukan tugasnya dengan benar. Penganut paham ini percaya bahwa suatu rezim bisa diubah dengan cara dihimbau atau diingatkan (Widjojo, 1999).

Gerakan mahasiswa memainkan peran penting dalam perubahan sosial dan politik, oleh karena itu sering menjadi suara kritis yang menantang kebijakan pemerintah serta sistem tertentu. Gerakan mahasiswa dapat muncul di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, dengan tujuan memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan masyarakat, keadilan sosial, demokrasi, dan isu-isu lainnya. Bersamaan dengan itu, gerakan mahasiswa ini diakomodir dalam satu wadah yang disebut organisasi baik itu dihimpun didalam (internal) kampus maupun diluar (eksternal) kampus. Diantara banyak organisasi tersebut, organisasi eksternal sangat memiliki peluang lebih besar dan bersinggungan dengan partai politik. Dimana, hubungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tujuan yang sama antara organisasi mahasiswa dengan partai politik dari yang berfokus pada hak asasi manusia, isu-isu demokratis, dan perubahan sosial. Lebih lanjut, dilihat dari segi momentum politik, dimana gerakan mahasiswa dan partai politik saling berkaitan dalam mengawal gerakan perubahan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa dan partai politik memiliki hubungan yang bearti dan keterakitan khususnya kontestasi pemilu.



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki dinamika politik lokal yang cukup unik, terutama dalam konteks Pemilu 2024. Dinamika politik tersebut berkaitan dengan fenomena dominasi politik berbasis figur yang masih sangat kuat kehadirannya. Dimana, pemilih lebih menilai tokoh berdasarkan kedekatan emosional dan latar belakang sosialnya ketimbang pertimbangan ideologis partai (Fitriani, 2023). Kehadiran fenomena tersebut tidak terlepas dengan peranan mahasiswa, khususnya dalam keterkaitan pada organisasi mahasiswa eksternal. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Secara normatif organisasi-organisasi tersebut memiliki independensi politik, namun pada kenyataannya, keterlibatan aktif kader dalam berbagai aktivitas politik, termasuk dalam pemenangan calon legislatif maupun calon presiden, menunjukkan adanya afiliasi politik terselubung yang berkembang di tingkat lokal (Suryadi, 2024). Selain itu, keterlibatan organisasi mahasiswa tidak lepas dari meningkatnya kesadaran politik generasi muda di Bangka Belitung, yang berusaha mengangkat isu-isu lokal seperti pertambangan timah ilegal, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan daerah (Nasution, 2024). Fenomena ini menjadi peluang strategis bagi organisasi kemahasiswaan untuk membentuk gerakan politik berbasis isu yang kritis dan berorientasi pada perubahan struktural. Namun demikian, tantangan besar juga mengemuka, seperti munculnya polarisasi politik di kalangan mahasiswa serta ancaman terhadap independensi organisasi akibat intervensi elite politik lokal (Lestari, 2023).

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi momen krusial dalam dinamika 5 politik nasional, termasuk di tingkat lokal seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain partai politik dan lembaga formal negara, organisasi kemahasiswaan berbasis ideologi seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan arah dukungan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara historis, PMII dan IMM memiliki akar ideologis yang kuat dan keterkaitan erat dengan organisasi keagamaan serta kelompok politik tertentu. PMII, misalnya, lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama (NU), sementara IMM merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Kedekatan historis ini kerap kali menjadikan kedua organisasi tersebut tidak sepenuhnya netral dalam setiap kontestasi politik, terutama dalam pemilu. Afiliasi politik, baik dalam bentuk dukungan personal, simbolik, maupun struktural terhadap calon legislatif maupun eksekutif, kerap kali menjadi bagian dari strategi kader dalam menegosiasikan posisi dan pengaruh.

Dalam konteks Bangka Belitung, dominasi politik lokal tidak hanya ditentukan oleh kekuatan partai besar, tetapi juga oleh jaringan sosial, etnisitas, dan afiliasi ideologis. Dalam hal ini, keterlibatan kader PMII dan IMM pada pemilu tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai tim sukses, relawan, atau bahkan kandidat legislatif, menjadi fenomena yang menuntut kajian akademik lebih lanjut. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana afiliasi politik terbangun dalam organisasi kemahasiswaan yang secara normatif mengklaim independensi politik. Apakah dukungan terhadap partai atau calon tertentu merupakan keputusan institusional, hasil kompromi ideologis, atau justru bagian dari strategi individual kader untuk memperluas jejaring politik. Selain itu, bagaimana pengaruh afiliasi ini terhadap dinamika internal organisasi, terutama dalam menjaga nilai-nilai idealisme dan independensi gerakan mahasiswa. Dengan mengambil studi kasus PMII dan IMM di Bangka Belitung,



penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual tentang praktik afiliasi politik dalam tubuh organisasi mahasiswa, sekaligus berkontribusi pada wacana demokratisasi dan partisipasi politik generasi muda tidak hanya di tingkatan lokal tapi juga ke tingkat nasional.

Penelitian ini menggunakan teori mobilisasi sumberdaya dari Anthony Oberschall pada tahun 1973, teori yang berasumsi bahwa faktor penting dalam melakukan mobilisasi karena telah memiliki jaringan komunikasi yang sudah matang. Terdapat 5 faktor penting mobilisasi ini diantaranya; Pertama, Organisasi gerakan sosial dimana melihat dari berbagai sudut pandang dalam organisasi tersebut dari mulai sistem pengelolaan organisasi, struktur organisasi, gerakan dan tindakan organisasi serta pendapat dari para pengurus pasif maupun masif. Kedua Pemimpin dan kepemimpinan, dimana pemimpin adalah sosok pembuat dan pengambilan keputusan yang dapat mengorganisir untuk ikut berpartisipasi serta kepemimpinan dimana kemampuan dalam mempengaruhi kelompok untuk pencapaian tujuan dalam hal ini pemilu 2024. Ketiga, Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya dimana terdapat lima tipe dalam gerakan sosial yang akan dilihat pada pemilu 2024 ini, yaitu : sumberdaya moral, sumberdaya kultural, sumberdaya organisasi sosial, sumberdaya manusia, sumberdaya material. Keempat, Jaringan dan partisipasi organisasi kemahasiswaan dalam hal ini keterlibatan PMII dan IMM terhadap partai politik pada pemilu 2024. Kelima, Peluang dan Kapasitas terjadinya afiliasi politik pada pemilu 2024 terhadap PMII dan IMM terhadap partai politik.

Penelitian ini akan lebih lanjut menganalisis lebih dalam tentang bentuk afiliasi politik organisasi kemahasiswaan terhadap partai politik dalam Pemilu 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus melihat tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam dinamika politik lokal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan data berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Mengutip pendapat Kirk dan Miller yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Lexy J. Moeloeng, 2011). Penelitian kualitatif menggunakan banyak data untuk membuat generalisasi dan prediksi serta menganalisis perilaku, khususnya dalam penelitian ini akan melihat sikap politik yang tidak dapat dikuantifikasikan. Oleh karena itu, metode penelitian diambil secara pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti dapat menjelaskan secara mendalam mengenai fenomena afiliasi politik tersebut untuk di deskripsikan atau gambarkan secara mendalam melalui kata-kata.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pulau Bangka di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan, penelitian akan meneliti organisasi mahasiswa eksternal yaitu PMII dan IMM di Bangka Belitung. Kedua organisasi tersebut basinya berada pada 2 wilayah yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Waktu penelitian ini berlangsung selama 5 bulan yakni Januari-Mei 2025.



### **Target/Subjek Penelitian**

Informan merupakan seseorang yang memberikan informasi tentang suatu fenomena atau masalah yang diangkat dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat di lapangan, peneliti memiliki beberapa informan yang dianggap berkompeten dan terlibat langsung pada pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sample nonprobabilistik (non-acak) berdasarkan karakteristik atau properti dalam bentuk purposives sampling yang berarti penentuan informan dipilih dan ditetapkan secara sengaja dan bukan dilakukan secara acak. Purposive sampling merupakan sample yang diambil dari partisipan yang merupakan contoh yang unik atau menarik dari sesuatu yang akan diteliti.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan sebuah informasi penting perlu menentukan teknik pengumpulan data yang akan dijadikan acuan dasar dalam menjawab rumusan masalah yang akan diteliti. Dalam mengimplementasikan suatu metode penelitian yang bersifat kualitatif dan pengambilan data maka perlu diajukan pertanyaan – pertanyaan mengenai tema penelitian yang akan dikaji berupa narasi, table, grafik, dan gambar. Oleh karena itu, teknik pengumpulan datanya akan dimulai dengan observasi untuk memahami perilaku, aktivitas, atau proses sosial dalam konteks alaminya. Observasi dalam penelitian ini adalah non partisipasi, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung.

Selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi secara mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau perasaan seseorang terhadap suatu fenomena. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan yang telah ditentukan yakni pihak PMII dan IMM, pihak akademisi, pihak Partai Politik yang terlibat dalam proses peneliti dalam meneliti Afiliasi politik PMII dan IMM pada pemilu 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahapan berikutnya adalah dokumentasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data berupa kumpulan data atau dokumen terkait redaksi afiliasi politik terhadap PMII Dan IMM pada pemilu 2024 yang menjadi jaringan dalam mempengaruhi keputusan terhadap keberlangsungan afiliasi ini. Dan terakhir adalah studi pustaka, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti.

### **Teknik Analisis Data**

Setelah keseluruhan data yang diperlukan terkumpul, guna menjawab rumusan masalah, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data merupakan tahap peneliti dalam melakukan penelitian baik sebelum ataupun saat penelitian. Pada tahap ini peneliti tidak memiliki batas waktu pengumpulan data karena waktu yang ditentukan yakni pada proses perizinan penelitian berlangsung. Tahap pengumpulan data ini dilakukan secara langsung dilapangan dengan tujuan yang telah ditentukan pada penelitian yang akan diteliti.
2. Reduksi Data merupakan proses memilah dan memilih data yang dilakukan oleh peneliti dilapangan. Jumlah data yang diperoleh cukup banyak baik dari observasi, wawancara, hingga dokumen arsip maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada tahap inilah setelah peneliti memperoleh data maka perlu adanya reduksi data yang berarti merangkum,



memilih hingga dengan mengelompokkan jenis – jenis data 24 yang sesuai dengan fokus dan tema masing – masing penelitian. Pengkategorian data yang sudah diredukdi maka akan memperoleh gambaran detail hasil penelitian yang telah dikaji dan menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan.

3. Penyajian Data (Data Display) merupakan tahap mendisplaykan data secara ringkas yang disertai bagan dan susunan narasi dari hasil penelitian. Dengan adanya tahapan display maka data dari hasil penelitian dapat dengan mudah melanjutkan tahapan yang telah dipahami sebelumnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data dalam penelitian kualitatif maka penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowcart dan sebagainya

Pengambilan Keputusan (Verivication) Pengambilan keputusan merupakan tahap kesimpulan data yang merupakan proses akhir dari rangkaian teknik analisis data. Dimana pada hasil data yang ditemukan akan ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan menguraikan temuan dan analisis terkait kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam memahami dan mendeskripsikan afiliasi politik yang terjadi terhadap organisasi kemahasiswaan pada pemilu 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Selain itu, juga akan dibahas mengenai bentuk tantangan serta peluang yang dihadapi oleh organisasi kemahasiswaan dalam memperkuat afiliasi politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini mengacu pada teori Mobilisasi sumberdaya yang dikemukakan oleh Oberschall pada tahun 1973. Hasil temuan di lapangan dalam penelitian sebagai berikut:

### **A. Afiliasi Politik PMII dan IMM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilu 2024**

Afiliasi politik merupakan hubungan suatu individu, kelompok, atau organisasi dengan partai politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk afiliasi ini bisa berupa dukungan ideologis, kerja sama dalam kegiatan politik, atau keterlibatan dalam kampanye dan pemilu. Afiliasi politik yang dimaksud dalam penlitian in sering terjadi dalam bentuk kerjasama dengan partai politik yang memiliki basis pemilih di kalangan pemuda dan mahasiswa. Dalam hal ini, partai politik yang berkompetisi di Pemilu 2024, baik di tingkat nasional maupun lokal, banyak memanfaatkan jaringan mahasiswa untuk memperluas dukungannya, termasuk di Bangka Belitung. Seperti PMII dan IMM yang menjalin kerjasama dan kolaborasi pada pihak pemerintah, partai politik bahkan calon kontestasi dalam memberikan wadah aspirasi seperti seminar, diskusi politik, atau debat publik yang dihadiri oleh kandidat legislatif, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa serta memberikan gambaran tentang visi dan misi para calon.

Selain itu, para kader-kader organisasi dapat terlibat dalam pengawasan maupun penyelenggara pemilu baik di level daerah maupun nasional, yang tentunya berdampak pada proses pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, di balik keterlibatan ini, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi kemahasiswaan yang memilih berafiliasi dengan partai politik. Salah satu isu utama adalah masalah independensi. Organisasi



kemahasiswaan pada dasarnya dibentuk untuk menjadi wadah bagi mahasiswa dalam berkembang secara intelektual dan kritis terhadap situasi sosial-politik, bukan untuk dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis.

Dalam peran PMII dan IMM afiliasi politik dapat membantu organisasi menganalisis strategi terhadap peta politik lokal menjelang Pemilu 2024. PMII dan IMM memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan pemuda diharapkan dapat mengakomodir para kader atau anggotanya untuk menjadi pusat informasi sekaligus mampu menyampaikan visi misi kandidat secara langsung kepada masyarakat luas sehingga menjadi alasan serta pertimbangan setiap kalangan dalam memengaruhi kecenderungan suara, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Terlebih lagi, dalam pemilihan pemula di Bangka Belitung, sebagian besar terdiri dari mahasiswa yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa PMII dan IMM memiliki dinamika gerakan sosial yang dapat dijelaskan melalui perspektif teori mobilisasi sumber daya oleh Oberschall. Pertama, melalui struktur organisasi PMII menunjukkan pola mobilisasi melalui struktur organisasi yang bersifat kolektif dan fleksibel, dalam menunjang materialistis setiap program kerja organisasi sehingga kader memilih untuk dapat terlibat aktif dalam mendukung calon legislatif dari partai yang memiliki kedekatan ideologis. Hal serupa juga terjadi pada IMM, yang walaupun secara struktural lebih kaku karena terhubung dengan Persyarikatan Muhammadiyah, tetap menunjukkan adanya mobilisasi kader dalam dukungan politik. Kedua, Kepemimpinan dan peran elite alumni menjadi indikator penting sebagaimana yang dikatakan Oberschall, di mana para pemimpin tidak hanya mengorganisasi, tetapi juga memanfaatkan jejaring sosial untuk mendistribusikan sumber daya dan mengarahkan aksi kader. Di PMII, para alumni yang kini berkiprah di politik sering menjadi penggerak informal dalam menarik simpati kader terutama perihal pendanaan, mereka turut menjadi donatur kegiatan organisasi. Sementara di IMM, kepemimpinan menekankan netralitas organisasi namun tetap memberi ruang diskusi tentang politik. Sumber daya yang dimobilisasi meliputi dana kegiatan, jejaring media, hingga akses pada tokoh-tokoh publik. Dalam banyak kegiatan seperti seminar politik, baik PMII maupun IMM kerap mendapatkan dukungan dari alumni yang terafiliasi partai.

Ketiga, Jejaring alumni dan organisasi keagamaan menjadi saluran penting dalam proses afiliasi politik. PMII cenderung kuat dalam jaringan NU dan PKB, sedangkan IMM memiliki akses ke jaringan Muhammadiyah, meski tidak eksklusif. Afiliasi politik sangat bergantung pada kapasitas individu kader, terutama yang memiliki latar belakang retorika, kepemimpinan, dan relasi luas. Kader kader yang menonjol sering kali diajak langsung oleh alumni untuk terlibat dalam tim pemenang. Peluang ini dilihat oleh sebagian kader sebagai jalan awal untuk memahami dunia politik lebih dalam sebelum benar-benar terjun secara penuh. Meskipun begitu, kebebasan dalam berpolitik baik PMII maupun IMM dibatasi dengan larangan keras para kader untuk membawa nama organisasi untuk kepentingan pribadi. Namun dalam praktik pembagian anggota PMII, terutama yang telah menjadi alumni dan aktif di partai politik tertentu, seperti PKB atau partai-partai lain yang memiliki kaitan ideologis atau sejarah dengan Nahdlatul Ulama (NU). Keterlibatan ini sering kali bersifat material dan personal, bukan atas nama organisasi. Dimana adanya keterlibatan langsung melalui peran edukasi politik dan advokasi publik.

Misalnya PMII, Pada pemilu 2024 di Bangka Belitung, PMII lebih cenderung pada peran edukasi dan pengawasan, penyelenggara pemilu. Namun, terdapat keterlibatan secara



individu dari anggota atau alumni dalam politik praktis, terutama mendukung partai-partai berbasis NU seperti PKB, suatu hal yang tidak dapat dihindari sebab kebutuhan material dalam menjalankan program organisasi. Hal ini menjadi tantangan bagi PMII untuk tetap menjaga independensi organisasi sekaligus mendorong kadernya untuk bisa aktif dalam perkembangan dunia politik. Dukungan tersebut biasanya diberikan dalam kapasitas pribadi. Kemudian pengaruh alumni PMII, yang aktif di partai politik sering menjadi jembatan antara organisasi dan dunia politik praktis. Meskipun begitu, ditemukan pula bahwa PMII tidak selalu beralih ke PKB dalam berpolitik tetapi bisa saja partai politik lainnya, bergitu pula dengan IMM dengan kebebasan dalam memilih arah berpolitiknya.

IMM dalam hal ini memiliki beberapa kegiatan keterlibatan IMM selama proses pemilu 2024 antara lain: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM pada pemilu 2024 mengeluarkan arahan khusus terkait Pemilu 2024, menegaskan pentingnya menjaga kedamaian dan semangat kebersamaan dalam setiap langkah yang diambil oleh pimpinan dan kader IMM di seluruh Indonesia. Deklarasi sukseskan pilkada serentak, DPD IMM Bangka Belitung melakukan deklarasi untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024, menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan pemilu yang bersih dan aman. Sosialisasi dan edukasi politik IMM berperan sebagai agen perubahan dengan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam proses politik, termasuk pengawasan pemilu. Mereka bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan partisipasi pengawasan oleh mahasiswa. Pendidikan politik bagi kader dimana IMM menekankan pentingnya pendidikan politik bagi anggotanya untuk membentuk budaya politik yang sehat dan berintegritas. Mereka berupaya menjadi pilar perubahan dalam sistem politik Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai islam yang berkemajuan. Pada kontestasi Pemilu damai Bangka Belitung 2024 IMM mendekralasikan bahwasannya kontestasi tidak merujuk pada kemenangan, akan tetapi merujuk pada kesejahteraan umat dan kesatuan Negara Republik Indonesia sehingga meminimalisir pertikaan yang terjadi anatara kader IMM atau Muhammadiyah Itu sendiri.

Secara keseluruhan keterlibatan dengan lima indikator dalam teori yang digunakan menegaskan bahwa afiliasi politik pada organisasi kemahasiswaan di Bangka Belitung pada Pemilu 2024 mencerminkan peran mahasiswa yang semakin aktif dalam politik lokal maupun nasional. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan terkait independensi dan objektivitas, keterlibatan organisasi kemahasiswaan ini menunjukkan betapa pentingnya peran generasi muda dalam proses demokrasi. Dengan afiliasi politik yang bijak dan berlandaskan pada nilai-nilai kebebasan akademik, organisasi kemahasiswaan dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat politik yang lebih inklusif dan sadar akan hak-hak politiknya.

## **B. Tantangan dan Peluang Politik PMII dan IMM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Pemilu 2024**

Dalam konteks Pemilu 2024, Organisasi Mahasiswa seperti PMII dan IMM di Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam keterlibatan politik. Dalam kerangka teori mobilisasi sumber daya yang dikemukakan oleh Oberschall (1973), keterlibatan organisasi mahasiswa seperti PMII dan IMM dalam politik tidak semata-mata ditentukan oleh niat atau kesadaran ideologis, melainkan oleh kemampuan mereka dalam mengorganisasi, mengakses, dan memobilisasi berbagai sumber daya. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



realitas politik pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa PMII dan IMM menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks.

Tantangan yang utama dihadapi oleh PMII dan IMM dalam menjalin afiliasi politik pada Pemilu 2024 di Bangka Belitung adalah adanya stigma negatif dari masyarakat dan internal kampus. Banyak pihak menilai bahwa organisasi kemahasiswaan seharusnya menjaga independensinya sebagai agen perubahan sosial dan bukan menjadi alat kekuasaan partai politik. Afiliasi politik yang terlalu terang-terangan sering kali dianggap mencederai nilai-nilai idealisme gerakan mahasiswa. Selain itu, polarisasi internal juga menjadi tantangan yang nyata, ketika organisasi memiliki anggota yang beragam latar belakang dan pandangan politik sehingga keterlibatan afiliasi politik bisa memicu konflik internal, kecenderungan dalam perbedaan pandangan antara kader senior dan junior mengenai arah politik organisasi. Hal ini bisa menghambat solidaritas internal dan mengganggu proses kaderisasi.

Pada aspek struktur organisasi, PMII dan IMM sama-sama memiliki sistem kepengurusan yang hierarkis, sehingga memudahkan distribusi informasi dan instruksi politik. Tetapi tantangannya terletak pada perbedaan karakteristik struktur antar wilayah. Di beberapa daerah, struktur PMII dan IMM masih bergantung pada figur sentral, sehingga koordinasi vertikal dan horizontal menjadi kurang efektif dalam merespons dinamika politik lokal. Lebih lanjut keputusan politik yang bersifat top-down ini akan bergantung pada figur kunci yang memiliki afiliasi atau hubungan dengan partai. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas dalam mobilisasi dapat lebih cepat namun di sisi lain juga rentan terhadap arah kepentingan elit tertentu. Begitupun dalam aspek sumber daya, terutama sumber daya material baik PMII maupun IMM umumnya tidak memiliki logistik memadai untuk bergerak secara mandiri yang bisa menjamin setiap agenda dan program kerja yang di rancang. Sehingga peran alumni yang telah mendukung agenda organisasi berpotensi mengalami ketergantungan oleh kader, bersamaan dengan itu menjadi celah peluang keterlibatan pada politik praktis walaupun berisiko menggerus idealisme.

Peluang dalam hal ini dapat dilihat dari jejaring elite yang teorganisir dimiliki PMII dan IMM. Hubungan tersebut dapat memberikan dukungan elektoral, menyebarkan narasi politik, dan menjadi penghubung antara calon legislatif dengan pemilih muda sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai kekuatan kolektif untuk menyampaikan aspirasi serta ide & gagasan yang dapat dijadikan bahan evaluasi para calon pemimpin. Afiliasi politik juga dapat membuka jalan bagi kader untuk masuk dalam struktur formal politik. Tidak sedikit kader PMII dan IMM yang akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, atau menjadi bagian dari tim sukses kampanye. Proses ini menjadi sarana regenerasi kepemimpinan politik dari kalangan muda, yang nantinya bisa berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik di Bangka Belitung. Peluang terakhir adalah penguatan posisi tawar organisasi. Ketika PMII dan IMM menunjukkan peran signifikan dalam mobilisasi massa dan opini publik, mereka bisa memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Hubungan yang sehat dengan partai politik bisa dijadikan instrumen untuk mendorong isu-isu strategis seperti pendidikan, pengangguran pemuda, dan partisipasi politik kaum muda.

Oberschall berpendapat bahwa gerakan sosial tidak muncul semata-mata karena ketimpangan atau ketidakpuasan, melainkan karena adanya kapasitas organisasi dalam menghimpun, mengelola, dan mengarahkan sumber daya seperti jaringan, kepemimpinan, legitimasi sosial, dan akses terhadap institusi kekuasaan. Organisasi mahasiswa seperti PMII



dan IMM perlu terus membangun koordinasi, memperkuat kepemimpinan yang transformatif, dan memastikan partisipasi kader berlangsung secara sadar dan tidak pragmatis semata.

Kepemimpinan dalam PMII dan IMM menjadi faktor penting dalam menentukan arah afiliasi politik. Figur ketua cabang atau komisariat yang memiliki hubungan baik dengan tokoh politik lokal sering menjadi penghubung antara organisasi dan partai. Di sisi lain, terlalu dominannya figur pemimpin juga bisa menciptakan ketergantungan dan melemahkan proses demokratisasi internal. Jaringan PMII dan IMM dengan organisasi lain, baik sesama OKP maupun lembaga keagamaan dan media lokal, berpotensi memperkuat mobilisasi politik. Namun, jaringan ini belum semuanya dimanfaatkan secara optimal karena masih adanya eksklusivitas antar organisasi. Meski begitu, di beberapa daerah, kolaborasi sudah mulai terbangun, terutama ketika ada isu bersama seperti pendidikan dan lapangan kerja.

Dalam perspektif teori Mobilisasi Sumberdaya yang dikemukakan oleh Anthony Oberschall (1973), keterlibatan PMII dan IMM dalam Pemilu 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dipahami sebagai bentuk upaya mobilisasi kolektif yang bertujuan memengaruhi ruang sosial-politik melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks ini, PMII dan IMM telah memanfaatkan posisi strategis mereka sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki akar kuat di basis massa keagamaan (NU dan Muhammadiyah) untuk membangun citra politik etis dan memperluas pengaruh di tingkat lokal. Aktivitas deklarasi pemilu damai, penolakan terhadap politik uang dan hoaks, serta audiensi dengan pejabat pemerintah menunjukkan bahwa keduanya tengah menggerakkan sumber daya simbolik dan institusional guna mengokohkan posisi mereka sebagai aktor kunci dalam politik lokal. Dengan tidak secara eksplisit menyatakan afiliasi kepada partai politik tertentu, namun tetap aktif dalam ruang diskursus publik dan relasi kekuasaan guna menunjang aspek material, PMII dan IMM menempatkan diri dalam proses mobilisasi yang terorganisir, bertujuan jangka panjang yakni menciptakan jalur politik yang kondusif bagi kaderisasi internal serta memperkuat posisi tawar dalam keberlangsungan demokrasi lokal.

Afiliasi politik dalam PMII dan IMM memang eksis secara *de facto*, meskipun secara normatif keduanya menyatakan independensi dari partai politik. Dalam praktiknya, oportunisme bisa muncul bila kader lebih mementingkan akses kekuasaan ketimbang nilai perjuangan organisasi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga nilai ideologis dan integritas kaderisasi, sambil tetap realistis menghadapi dinamika politik nasional. Tantangan lainnya dari aspek kemandirian sumber daya dan konsolidasi internal, namun juga memiliki peluang dalam bentuk sumber daya material, jaringan alumni, akses ke ruang politik praktis, dan peningkatan kapasitas kader. Jika teori Oberschall mengajarkan bahwa keberhasilan gerakan sosial tergantung pada kemampuan kolektif mengorganisasi sumber daya yang tersebar, maka organisasi mahasiswa seperti PMII dan IMM perlu terus membangun koordinasi, memperkuat kepemimpinan yang transformatif, dan memastikan partisipasi kader berlangsung secara sadar dan tidak pragmatis semata.

## **KESIMPULAN**

Hasil penjelasan dan hasil analisis yang peneliti lakukan, serta pembahasan hasil temuan yang peneliti temukan di lapangan, maka peneliti menarik kesimpulan terkait Afiliasi Politik PMII Dan IMM Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Keterlibatan PMII dan IMM pada afiliasi politik menegaskan posisi independennya dalam politik. Akan



tetapi banyak anggota terutama para alumni yang terlibat lebih dominan secara pribadi dalam partai politik yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun keterlibatan ini tidak mewakili PMII dan IMM secara resmi, melainkan dalam kapasitas individu. Dalam kontestasi Pemilu 2024 menjadi menarik dikarenakan kader atau alumni PMII dan IMM tidak hanya ikut dalam partisipasi penyelenggara dan pengawasan namun ada yang ikut berkontestasi pada Pemilu 2024 yang tidak hanya di usung oleh satu partai saja namun ada beragam partai yang menjadi kendaraan para kader atau alumni PMII dan IMM seperti Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, PKS, PAN. Hal ini membuktikan bahwa kapasitas dan kualitas kader dan alumni menjadi pertimbangan di kalangan partai politik yang terbukti pada Pemilu 2024.

Hal ini dapat dilihat dalam mobilisasi sumberdaya yang ikut memainkan peran dalam afiliasi politik tersebut. Dalam organisasi gerakan sosial pada struktur organisasi misalkan, PMII dan IMM sama-sama memiliki hierarkis yang mapan, mulai dari tingkat komisariat hingga cabang, sehingga memungkinkan terjadinya koordinasi internal dalam merespon dinamika politik. Tetapi dalam praktik afiliasi politik mereka cenderung tidak menggunakan secara formal atau dilembagakan, melainkan berdasarkan inisiatif personal kader. Kondisi tersebut tentunya dipengaruhi oleh kepemimpinan organisasi sebagai tonggak dalam menentukan arah pada sikap politik. Karena beberapa pemimpin memiliki afiliasi personal dengan partai tertentu, yang kemudian memengaruhi arah dukungan kader di tingkat bawah. Lebih lanjut, organisasi memiliki keterbatasan sumber daya material seperti dana dan fasilitas, sehingga dalam menghadapi momentum politik seperti Pemilu 2024, mereka sering bergantung pada dukungan dari pihak eksternal, terutama aktor politik. Sumber daya manusia dalam bentuk kader aktif menjadi kekuatan utama dalam mobilisasi, baik untuk kampanye maupun aktivitas politik lainnya. Meskipun mobilisasi ini cenderung tidak terkoordinasi secara kelembagaan dan lebih didorong oleh relasi personal.

Selanjutnya pada pola Jaringan dan Partisipasi dimana PMII dan IMM memiliki jaringan luas yang terdiri dari alumni, simpatisan, dan relasi lintas organisasi, yang menjadi jalur penting dalam aktivitas afiliasi politik. Namun partisipasi ini tidak selalu diiringi dengan arahan ideologis atau pendidikan politik yang kuat, sehingga rawan dimanfaatkan oleh kepentingan pragmatis. Jaringan yang kuat menjadi peluang bagi organisasi untuk memperluas pengaruh politiknya, tetapi perlu dikelola agar tetap sejalan dengan nilai-nilai gerakan. Terakhir adalah Peluang dan Kapasitas Individu dimana banyak kader PMII dan IMM di Bangka Belitung yang memiliki kapasitas cukup baik di bidang politik, komunikasi, dan advokasi. Pemilu 2024 memberikan ruang aktualisasi diri bagi mereka, baik sebagai peserta maupun penggerak politik. Namun, peluang ini belum sepenuhnya diorganisir oleh organisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang, sehingga potensi kader sering berkembang secara personal tanpa arahan strategis dari organisasi.

Oleh karena itu, Afiliasi politik PMII dan IMM dalam Pemilu 2024 mencerminkan realitas kompleks antara idealisme organisasi dan dinamika politik praktis. Melalui pendekatan mobilisasi sumber daya, dapat dilihat bahwa keberhasilan maupun tantangan afiliasi ini sangat bergantung pada bagaimana organisasi mengelola struktur internal, kepemimpinan, serta jejaring dan potensi kader. Dengan penguatan kelembagaan dan manajemen sumber daya yang lebih terarah, PMII dan IMM memiliki peluang besar untuk menjadi aktor politik strategis yang tetap menjunjung nilai perjuangan dan independensi.



## **SARAN**

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian terkait afiliasi politik berbasis sumberdaya manusia pada organisasi kemahasiswaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pemilu 2024 sebagai berikut:

1. Afiliasi politik yang terdapat pada organisasi kemahasiswaan pada pemilu 2024 menjadi polemik dikalangan mahasiswa sebagai acuan untuk ikut terlibat didalamnya, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat. Seperti PMII dan IMM yang perlu meningkatkan kesadaran politik di kalangan anggotanya agar dapat menjadi agen perubahan yang kritis dan tetap independen.
2. Teori Mobilisasi Sumberdaya sangat menekankan kapasitas organisasi dalam mengelola sumber daya. Namun, kurang memberikan ruang terhadap faktor struktural dan konteks lokal, seperti: Struktur politik lokal dan jejaring kekuasaan di Bangka Belitung serta peran birokrasi, elite lokal, atau partai-partai dalam memfasilitasi atau membatasi ruang gerak organisasi mahasiswa, maka harus di padukan dengan teori lain atau dengan pendekatan struktur peluang politik (Political Opportunity Structure) agar lebih kontekstual dan realistis dalam memetakan bagaimana lingkungan eksternal memengaruhi strategi pada mobilisasi PMII dan IMM.
3. Oberschall lebih menekankan sumber daya material dan organisasional (jaringan, dana, massa, logistik). Namun dalam penelitian PMII dan IMM: Yang lebih dominan justru sumber daya simbolik dan ideologis seperti legitimasi agama, moral politik, dan kedekatan historis dengan ormas Islam, Maka perlu dikritisi bahwa teori ini belum sepenuhnya menangkap pada nilai-nilai kultural dan ideologis sebagai sumber daya kunci dalam konteks organisasi berbasis agama di Indonesia.
4. Secara umum, teori mobilisasi sumber daya cukup kuat untuk menjelaskan bagaimana PMII dan IMM mengorganisir diri dalam ruang politik. Namun, untuk penelitian yang lebih holistik dan kontekstual: disarankan untuk melengkapi atau mengevaluasi teori ini dengan pendekatan tambahan seperti struktur peluang politik, teori jaringan, atau bahkan pendekatan budaya politik, agar dapat menangkap realitas lokal, simbolik, dan ideologis yang sangat penting dalam politik kemahasiswaan di Indonesia.

## **TENTANG PENULIS**

Andi Fitri Sasmita adalah mahasiswa di Universitas Bangka Belitung, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini, beliau sedang menyelesaikan pendidikan sarjana dan tertarik pada studi terkait hubungan politik antar organisasi mahasiswa eksternal yaitu PMII dan IMM dengan partai politik. Risetnya berfokus pada mobilisasi sumber daya yang khususnya pada Pemilu 2024 di Bangka Belitung. Kedua organisasi tersebut menarik untuk dikaji karena keterkaitan dengan partai politik, sehingga berpotensi menciptakan kepentingan-kepentingan didalamnya. Untuk itu, perlu melihatnya dalam beberapa indikator yang disampaikan Oberschall yakni struktur organisasi, kepemimpinan, sumber daya, jaringan-partisipasi, serta peluang dan kapasitas individu. Oleh karena itu topik penelitian khusus yang diangkat dalam tulisan ini adalah "Afiliasi Politik PMII Dan IMM Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung"

Sebagai mahasiswa, Andi Fitri Sasmita terlibat dalam penelitian terkait isu sosial dan politik khususnya didalam organisasi mahasiswa baik itu internal kampus maupun eksternal



kampus. Penulis dapat dihubungi melalui email di [andifitrisasmita@gmail.com](mailto:andifitrisasmita@gmail.com) untuk pertanyaan lebih lanjut atau kolaborasi riset.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Afifuddin & Beni Ahmad Saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hasan, M. (2018). "Pengaruh Kepemimpinan terhadap Afiliasi Politik dalam Organisasi Mahasiswa." *Jurnal Politik Indonesia*, 5(1), 45-58
- Hidayatullah, H. (2020). *IMM dalam Konstelasi Politik Nasional*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Fitriani, A. (2023). *Politik Lokal dan Figuritas di Bangka Belitung*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Lestari, D. *Perilaku Politik dan Elite (Studi tentang Pengaruh Pilihan Politik Elite PWNU pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Terhadap Khittah 1926)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan 70 Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Lestari, D. (2023). *Polarisasi Politik di Kalangan Mahasiswa*. Jakarta: Literasi Nusantara.
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R. (2024). *Isu Lokal dalam Pemilu: Kasus Bangka Belitung*. Bandung: Fokus Media.
- Oberschall, Anthony. (1973). *Social Conflict and Social Movements*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Suryadi, T. (2024). Peran Organisasi Mahasiswa dalam Kontestasi Politik 2024. *Jurnal Politik dan Sosial*, 9(2), 112-128.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang. Intrans Publishing
- Slametmuljana, Prof.Dr., 1969, *Nasionalisme sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*
- Widjojo, Muridin S. 1999. *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*.